



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

PERATURAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penetapan kelas jabatan berdasarkan validasi hasil evaluasi jabatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah serta adanya perubahan nomenklatur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan penyesuaian kelas jabatan untuk jabatan fungsional oleh instansi pembina, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa penetapan kelas jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat dengan Nomor B/986/M.SM.04.00/2021 perihal Persetujuan Penetapan Perubahan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 9 September 2021 dan surat Nomor B/154/M.SM.02.00/2023 perihal Persetujuan Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 2 Februari 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);
3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

- (1) Daftar Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Lembaga ini terdiri atas:
- Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - Jabatan Administrasi; dan
  - Jabatan Fungsional.

- (2) Daftar Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

#### Pasal 2

Setiap Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### Pasal 3

- (1) Penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan serta penambahan jabatan sesuai persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 9 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (2) Penyesuaian terhadap nomenklatur jabatan dan kelas jabatan serta penambahan jabatan sesuai persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 2 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

#### Pasal 4

Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dibayarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penghasilan Pejabat Administrasi yang terdampak penataan birokrasi.

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran tunjangan kinerja untuk Pejabat Fungsional hasil penyetaraan sebagaimana pasal 3 ayat 1 dibayarkan mulai bulan Oktober 2021.
- (2) Pembayaran tunjangan kinerja untuk Pejabat Fungsional hasil penyetaraan sebagaimana pasal 3 ayat 2 dibayarkan mulai bulan Maret 2023.

#### Pasal 6

Pembayaran tunjangan kinerja untuk Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan mulai Peraturan ini diundangkan.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8  
Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 748

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I  
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

**DAFTAR KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**A. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI**

<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kelas Jabatan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Kepala LKPP	
2.	Sekretaris Utama	16
3.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	15
4.	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	15
5.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum	15
6.	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	16
7.	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	15
8.	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	15
9.	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	15
10.	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	16
11.	Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	15
12.	Direktur Pengembangan Sistem Katalog	15
13.	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	15
14.	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	16
15.	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	15
16.	Direktur Sertifikasi Profesi	15
17.	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	16
18.	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	15
19.	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	15
20.	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	15

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
21.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	15
22.	Inspektur	15

**B. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI**

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
(1)	(2)	(3)
<b>Jabatan Administrator</b>		
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara	12
2.	Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga	12
<b>Jabatan Pengawas</b>		
1.	Kepala Subbagian Protokol dan Rumah Tangga	9
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
<b>Jabatan Pelaksana</b>		
1.	Analisis Akreditasi Lembaga Diklat	7
2.	Analisis Barang Milik Negara	7
3.	Analisis Berkas Sengketa	7
4.	Analisis Data dan Informasi	7
5.	Analisis Diklat	7
6.	Analisis Hukum	7
7.	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama	7
8.	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional	7
9.	Analisis Kerjasama Diklat	7
10.	Analisis Kinerja	7
11.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7
12.	Analisis Pengembangan Kompetensi	7
13.	Analisis Perencanaan	7
14.	Analisis Perencanaan Anggaran	7
15.	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7
16.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
17.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
18.	Analisis Permasalahan Hukum	7
19.	Analisis Protokol	7
20.	Analisis Satuan Pengawas Internal	7

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
21.	Analisis Sistem Informasi	7
22.	Analisis Tata Usaha	7
23.	Bendahara	7
24.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
25.	Penelaah Pengembangan Usaha	7
26.	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
27.	Penyusun Laporan Keuangan	7
28.	Pengelola Rumah Tangga	6
29.	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6
30.	Ajudan	6
31.	Pengadministrasian Sertifikasi	6
32.	Pengadministrasian Umum	6
33.	Pengelola Barang Milik Negara	6
34.	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	6
35.	Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa	6
36.	Pengelola Keuangan	6
37.	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6
38.	Pengelola Sertifikasi	6
39.	Pengelola Situs atau Web	6
40.	Pengelola Teknologi Informasi	6
41.	Pranata Barang dan Jasa	6
42.	Sekretaris	6
43.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6
44.	Verifikator Anggaran	6
45.	Verifikator Keuangan	6
46.	Pengadministrasian Keuangan	5
47.	Pengadministrasian Layanan Pengadaan secara Elektronik	5

**C. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL**

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	Analisis Data Ilmiah Ahli Madya	11
2.	Analisis Data Ilmiah Ahli Muda	9

<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kelas Jabatan</b>
3.	Analisis Data Ilmiah Ahli Pertama	8
4.	Analisis Hukum Ahli Madya	11
5.	Analisis Hukum Ahli Muda	9
6.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
7.	Analisis Kebijakan Madya	12
8.	Analisis Kebijakan Muda	10
9.	Analisis Kebijakan Pertama	8
10.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
11.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
12.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
13.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya	12
14.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	10
15.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	8
16.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
17.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
18.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
19.	Arsiparis Ahli Madya	11
20.	Arsiparis Ahli Muda	9
21.	Arsiparis Ahli Pertama	8
22.	Arsiparis Penyelia	8
23.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
24.	Arsiparis Pelaksana/Terampil	6
25.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
26.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
27.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
28.	Auditor Ahli Utama	14
29.	Auditor Ahli Madya	12
30.	Auditor Ahli Muda	10
31.	Auditor Ahli Pertama	8
32.	Manggala Informatika Ahli Madya	12
33.	Manggala Informatika Ahli Muda	10
34.	Manggala Informatika Ahli Pertama	8



<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kelas Jabatan</b>
35.	Penata Laksana Barang Penyelia	9
36.	Penata Laksana Barang Mahir	8
37.	Penata Laksana Barang Terampil	7
38.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
39.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
40.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
41.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
42.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
43.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
44.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12
45.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10
46.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
47.	Perencana Ahli Madya	12
48.	Perencana Ahli Muda	10
49.	Perencana Ahli Pertama	8
50.	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11
51.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9
52.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8
53.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
54.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7
55.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
56.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
57.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
58.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
59.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
60.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
61.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
62.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
63.	Pranata Komputer Penyelia	8
64.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
65.	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6
66.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5

<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kelas Jabatan</b>
67.	Pustakawan Ahli Pertama	8
68.	Sandiman Ahli Madya	12
69.	Sandiman Ahli Muda	10
70.	Sandiman Ahli Pertama	8
71.	Statistisi Ahli Madya	11
72.	Statistisi Ahli Muda	9
73.	Statistisi Ahli Pertama	8
74.	Widyaiswara Ahli Utama	14
75.	Widyaiswara Ahli Madya	12
76.	Widyaiswara Ahli Muda	10
77.	Widyaiswara Ahli Pertama	8

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II  
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

**DAFTAR KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
PADA 9 SEPTEMBER 2021**

**A. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI**

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	15
2.	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	15
3.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum	15

**B. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI**

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
(1)	(2)	(3)
<b>Jabatan Administrator</b>		
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara	12
2.	Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga	12
<b>Jabatan Pengawas</b>		
1.	Kepala Subbagian Protokol dan Rumah Tangga	9
<b>Jabatan Pelaksana</b>		
1.	Analisis Akreditasi Lembaga Diklat	7
2.	Analisis Barang Milik Negara	7
3.	Analisis Berkas Sengketa	7
4.	Analisis Data dan Informasi	7
5.	Analisis Diklat	7
6.	Analisis Hukum	7
7.	Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama	7
8.	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional	7
9.	Analisis Kerjasama Diklat	7
10.	Analisis Kinerja	7

<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kelas Jabatan</b>
11.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7
12.	Analisis Pengembangan Kompetensi	7
13.	Analisis Perencanaan	7
14.	Analisis Perencanaan Anggaran	7
15.	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7
16.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7
17.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
18.	Analisis Permasalahan Hukum	7
19.	Analisis Protokol	7
20.	Analisis Satuan Pengawas Internal	7
21.	Analisis Sistem Informasi	7
22.	Analisis Tata Usaha	7
23.	Bendahara	7
24.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
25.	Penelaah Pengembangan Usaha	7
26.	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7
27.	Ajudan	6
28.	Pengelola Barang Milik Negara	6
29.	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	6
30.	Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa	6
31.	Pengelola Keuangan	6
32.	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6
33.	Pengelola Sertifikasi	6
34.	Pengelola Situs atau Web	6
35.	Pengelola Teknologi Informasi	6
36.	Pranata Barang dan Jasa	6
37.	Sekretaris	6
38.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6
39.	Verifikator Anggaran	6
40.	Pengadministrasi Keuangan	5
41.	Pengadministrasi Layanan Pengadaan secara Elektronik	5

**C. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL**

<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kelas Jabatan</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	Analisis Hukum Ahli Madya	11
2.	Analisis Hukum Ahli Muda	9
3.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
4.	Analisis Kebijakan Madya	12
5.	Analisis Kebijakan Muda	10
6.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
9.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
10.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
11.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
12.	Arsiparis Ahli Madya	11
13.	Arsiparis Ahli Muda	9
14.	Arsiparis Ahli Pertama	8
15.	Arsiparis Penyelia	8
16.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
17.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
18.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
19.	Penata Laksana Barang Penyelia	9
20.	Penata Laksana Barang Mahir	8
21.	Penata Laksana Barang Terampil	7
22.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
23.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
24.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
25.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
26.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
27.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	11
28.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	9
29.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
30.	Perencana Ahli Madya	11

<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kelas Jabatan</b>
31.	Perencana Ahli Muda	9
32.	Perencana Ahli Pertama	8
33.	Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11
34.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9
35.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
36.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7
37.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
38.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
39.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
40.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
41.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
42.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
43.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
44.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
45.	Pranata Komputer Penyelia	8
46.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
47.	Pranata Komputer Pelaksana/Terampil	6
48.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5
49.	Sandiman Ahli Madya	12
50.	Sandiman Ahli Muda	10
51.	Sandiman Ahli Pertama	8
52.	Statistisi Ahli Madya	11
53.	Statistisi Ahli Muda	9
54.	Statistisi Ahli Pertama	8
55.	Manggala Informatika Ahli Madya	12
56.	Manggala Informatika Ahli Muda	10
57.	Manggala Informatika Ahli Pertama	8

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III  
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

**DAFTAR KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
PADA 2 FEBRUARI 2023**

**A. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI**

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	16

**B. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN ADMINISTRASI**

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
(1)	(2)	(3)
<b>Jabatan Pelaksana</b>		
1.	Penyusun Laporan Keuangan	7
2.	Pengelola Rumah Tangga	6
3.	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6

**C. KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL**

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	Analisis Data Ilmiah Ahli Madya	11
2.	Analisis Data Ilmiah Ahli Muda	9
3.	Analisis Data Ilmiah Ahli Pertama	8
4.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya	12
5.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	10
6.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama	8
7.	Auditor Ahli Utama	14
8.	Auditor Ahli Madya	12
9.	Auditor Ahli Muda	10
10.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12
11.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10
12.	Perencana Ahli Madya	12

<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kelas Jabatan</b>
13.	Perencana Ahli Muda	10
14.	Widyaiswara Ahli Utama	14
15.	Widyaiswara Ahli Madya	12
16.	Widyaiswara Ahli Muda	10

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HENDRAR PRIHADI